

Kebutuhan Bidan Desa Terpenuhi

PURWOREJO (KR) - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo untuk memberikan pelayanan kesehatan, terutama kesehatan anak dan ibu hamil, serta ibu melahirkan mulai terpenuhi. Bahkan hingga kini sudah ada sekitar 300-an bidan disebar di seluruh desa di Purworejo. “Untuk kebutuhan bidan desa sudah bisa terlayani dengan tenaga kesehatan yang kita miliki,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purworejo drg Nancy Megawati MM, Senin (21/9). Ketersediaan tenaga bidan ini termasuk 22 orang CPNS formasi PTT bidan yang diambil sumpah/janji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Purworejo oleh Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM di ruang Arahawang Kantor Bupati bersama delapan orang CPNS dari formasi lainnya. Menurut Nancy Megawati, para bidan yang diambil sumpah/janji sebagai PNS ini merupakan tenaga lama dan bahkan nyaris tidak bisa diangkat lagi sebagai PNS karena faktor usia. “Kalau ini sampai tertunda lagi, mereka sudah tidak bisa diangkat menjadi PNS,” jelasnya. Usai mengambil sumpah/janji Bupati Purworejo Agus Bastian menandakan, bahwa saat sekarang tuntutan publik akan kinerja aparatur pemerintah harus lebih professional. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap aparatur PNS untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Untuk itu, saya berpesan kepada saudara untuk ikut membangun dan menjaga citra positif PNS dengan bekerja sebaik-baiknya, dengan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, tandasnya. **(Nar)**

Meninggal Anggota Panwaslu Terima Santunan

PURWOREJO (KR) - Seorang anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Ahmad Munsyarif warga Desa Lubang Lor Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo menerima santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 42 juta. Yang bersangkutan meninggal dunia saat menjalankan tugas pengawasan. Santunan diterimakan kepada istrinya Rusti Hatmi, selaku ahli waris. “Pemberian santunan ini sebagai wujud hadirmnya negara dalam memberikan jaminan asuransi kepada jajaran pengawas di tingkat bawah,” kata Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jateng Kartini Tjandra Lestari, Sabtu (19/9). Di sela-sela penyerahan santunan di Kantor Bawaslu Purworejo ini Kartini Tjandra Lestari mengatakan, bahwa pada pelaksanaan Pilkada 2020 ini seluruh jajaran pengawas di tingkat Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu kelurahan/desa dilindungi asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Terdaftarnya jajaran pengawasan di BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari pencegahan risiko yang bakal terjadi selama tugas pengawasan pada Pilkada 2020. “Jaminan kematian untuk jajaran pengawas sebagai bentuk prefentif. Bawaslu menjamin keamanan dalam menjalankan tugas, i tandas Kartini Tjandra Lestari yang didampingi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Imron Fatoni, Pimpinan Bawaslu Purworejo serta Panwaslu Kecamatan Butuh, dan keluarga ahli waris. **(Nar)**

DI MASA PANDEMI COVID-19
Kabupaten Magelang Pertama ODF

MAGELANG (KR) - Kabupaten Magelang merupakan yang ke-20 dan yang pertama kali Open Defecation Free (ODF) di Provinsi Jateng di tengah masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Wahyu Setianingsih pada saat verifikasi ODF stop buang air besar sembarangan tingkat Kabupaten Magelang, di Ruang Cemerlang Setda Kabupaten Magelang, beberapa waktu lalu. “Tentu perjuangannya sangat berat, maka kami mengapresiasi Kabupaten Magelang yang konsen dengan kesehatan masyarakatnya,” kata Wahyu, Senin (21/9) kembali menandakan soal pencapaian itu. Menurutnya, melalui ODF ada banyak mata rantai penyakit yang bisa diputuskan. Meskipun belum bisa dipublikasikan karena masih harus menunggu penelitian, mata rantai penyebaran Covid-19 juga bisa ditekkan melalui ODF, karena salah satu penyebarannya juga bisa melalui feses (kotoran) dengan buang air besar sembarangan. Dalam hal ini, Wahyu Setianingsih menegaskan bahwa, tim verifikasi ODF Provinsi Jateng akan terjun ke lapangan di 8 Kecamatan yang sudah ditentukan secara acak. Tim verifikasi tersebut akan bergerak secara independen dan tidak

akan mau untuk diarahkan. “Tim Verifikasi ini sudah teruji di Kota/Kabupaten yang lain. Jadi tidak usah repot-repot untuk mengarahkan, karena mereka akan blusukan sendiri dan tujuannya betul-betul harus obyektif dan tidak bisa dipengaruhi. Kami harap tidak ada temuan, apabila ada temuan maka akan kami tunggu 3 kali 24 jam untuk segera diperbaiki agar nanti bisa langsung lolos” jelasnya. Bupati Magelang, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang, Adi Waryanto dalam sambutannya mengatakan, kesehatan masyarakat sangat berkaitan erat dengan perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan dan keturunan. Berbagai macam penyebaran penyakit seperti diare, cacingan, ISPA, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti SARS dan Flu Burung dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih serta menjaga kesehatan lingkungan. Untuk mendukung percepatan target Universal Access Sanitasi dan RPJMN 2020-2024 diperlukan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dimana salah satu kegiatan pokok pentingnya adalah mengkampanyekan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau ODF. **(Bag)**

KEPSEK SMPN BATURETNO TEPIS TERLIBAT
Penjualan Atribut Dilakukan Pihak Ketiga

WONOGIRI (KR) - Penjualan atribut sekolah SMP Negeri 1 Baturetno Wonogiri dilakukan pihak ketiga atau swasta. Pihak sekolah memberi izin pihak swasta yakni pemilik toko di depan sekolah ke luar masuk lingkungan SMPN Baturetno lantaran toko hanya berukuran kecil sehingga untuk menghindari kerumunan anak di tengah pandemi Covid-19. “Penjualan itu (atribut sekolah) bukan koperasi sekolah yang melakukan tapi dilakukan murni pihak swasta yakni pemilik toko di depan SMP kami,” ungkap Kepala SMP Negeri 1 Baturetno Dra Siti Safuroh MPd, Senin (21/9). Menurut dia, harga yang ditawarkan pihak toko kelontong sehari Rp 157.000 juga sama sekali tidak ada kompensasi dengan sekolah. Artinya, pihaknya tidak mendapatkan bagian atau komisi sepeserpun dari hasil penjualan itu. “Kami pribadi selaku kepala (sekolah) semula malah tidak tahu jika harga atribut sebesar Rp 157.000, tahu-tahu juga dari anak-anak didik yang membelinya,” imbuh Kepsek SMPN 1 Baturetno.

Dikatakan, tidak hanya sekali ini karyawan toko ke luar masuk lingkungan SMPN 1 Baturetno untuk menawarkan dagangan. Sehari-hari, ada saja karyawan toko menawarkan snack baik roti maupun minuman kepada para murid di masa pandemi. “Sesuai protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 kebanyakan anak belajar online, kalau yang tatap muka jumlahnya tidak banyak,” kata dia sembari menambahkan yang beli atribut sekolah tidak seluruh siswa karena pembelian perlengkapan baju seragam sekolah atau atribut itu bukanlah satu keharusan atau bersifat sukarela. Seperti diberitakan sejumlah orang tua wali murid SMPN 1 Baturetno mengeluhkan harga atribut sekolah sebesar Rp 157.000. Bisnis yang disebut-sebut melibatkan koperasi sekolah itu kontra produktif dengan program Pemkab Wonogiri yang menggratiskan seragam sekolah (setelan OSIS, Pramuka serta batik) mulai dari SD hingga SMP sebesar Rp 10 miliar lebih. **(Dsh)**

Kenaikan Cukai Rokok Tingkatkan Kesejahteraan

MAGELANG (KR) - Cukai tembakau merupakan penyumbang bagi penerimaan sumber dana negara. Tahun 2020 mencapai Rp 164,9 triliun, tahun 2021 akan dinaikkan 4,08 persen sehingga menjadi Rp 172,8 triliun. Rata-rata pemerintah akan menaikkan cukai tembakau 10 persen. Salah satu alasan untuk terus menaikkan cukai tembakau, diantaranya untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Demikian dikemukakan Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Centre (MTCC) Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma) Dra Retno Rusdijati MKes di forum pertemuan ‘Jumat Berkah’ dan dukungan terhadap kenaikan cukai rokok sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani yang dilak-

sanakan di Kampus 2 Unimma, Jumat (18/9). Beberapa petani dari wilayah Temanggung dan Magelang juga mengikuti kegiatan ini, termasuk Rektor Unimma Dr Sulis-wiyadi MAG. Retno Rusdijati mengatakan dari pertemuannya dengan petani diantaranya ada yang menyebutkan produksi bawang putihnya sudah 5 bulan belum laku, demikian juga produk pertanian lainnya. Cukai rokok juga memiliki banyak dampak, diantaranya mengurangi konsumsi rokok, khususnya bagi para pemula. Kalau cukainya naik, harga rokok juga ikut naik. Bila semakin naik, akan *eman-eman* kalau uangnya untuk membeli rokok. Penerimaan cukai merupakan kontributor ketiga terbesar dalam penerimaan dalam negeri, yang

95 persen berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan PMK Nomor 152/PMK.010/2019 tentang tarif cukai hasil tembakau. Dalam aturan ini pemerintah menaikkan cukai rata-rata mencapai 21,55 persen mulai Januari 2020. Dengan demikian tarif cukai sudah mengalami kenaikan 73,53 per-

sen sejak tahun 2015 hingga awal tahun 2020. Cukai selalu dikaitkan dengan pernyataan terkait peran Industri Hasil Tembakau (IHT) yang sangat strategis sehingga selalu muncul polemik berkepanjangan. Dari petani dampingan MTCC Unimma, yang tergabung dalam ‘Forum Petani Multikultur’, analisis masalah cukai dari perspektif alokasi pe-

manfaat DBHCHT. Mengacu pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 tahun 2020, alokasi DBHCHT tersebut digunakan dalam lima kegiatan, meliputi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi kebutuhan di bidang cukai, dan pemberantasan barang cukai ilegal. DBHCHT harusnya kembali pada pemangku kepentingan, seharusnya peruntukannya lebih fokus untuk petani dan buruh tembakau. Oleh karenanya, para petani memberi dukungan pada kenaikan cukai rokok dengan tuntutan bahwa semestinya pemerintah merumuskan rencana strategis yang berbasis kesejahteraan petani, tidak semata menonjolkan peran Industri Hasil Tembakau (IHT). **(Tha)**



KR-Thoha
Kegiatan bagi sayuran gratis ‘Jumat Berkah’ di Kampus 2 Unimma, Jumat.

49 Desa di Klaten Terdampak Pembangunan Jalan Tol

KLATEN (KR) - Sebanyak 49 desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Klaten terdampak proyek strategis nasional (PSN), pembangunan jalan tol Solo - Yogya, dengan luas lahan 3.775.217 M2. Kepastian data tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 590/48 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Tol Solo - Yogyakarta di Kabupaten Klaten.

Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Jaka Sawaldi, Senin (21/9) mengharapkan dengan SK penetapan lokasi tersebut bisa mengakomodirkan kepentingan wilayah, dampak lingkungan dan sosial termasuk responsif terhadap perkembangan lapangan. Selain menetapkan

kan data lokasi tanah, dengan SK Gubernur ini juga menetapkan peta lokasi sebagai dasar pengadaan tanah nantinya. “Yang terpenting kepentingan masyarakat dan pemerintah setempat diakomodir. Kita menyambut baik SK Gubernur ini, seperti pemihakan tenaga

lokal dalam pembangunan fisik jalan tol. Kita berharap masyarakat tidak sebagai penonton. Termasuk lahan pertanian Klaten seperti jaminan keberlanjutan irigasi tidak terganggu, termasuk sumber-sumber mata air dan situs sejarah,” harap Jaka Sawaldi. Jaka Sawaldi menanam-

bahkan setelah dilakukan konsultasi publik, pihak pelaksana yakni Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bisa memenuhi keinginan warga Klaten sebagaimana kesepakatan dalam komunikasi publik. “Biar pun konsultasi publik telah dilakukan, saya berharap Dirjend Bina Marga Kementerian tetap 24 jam membuka komunikasi dengan warga Klaten. Informasi yang berkembang bisa macam-macam. Tapi ketika masyarakat butuh

kepastian, tim kementerian bisa cepat memberikan jawaban. Pemkab Klaten akan siap membantu agar tidak terjadi informasi yang salah,” tambahnya. Sesuai lampiran SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/48 Tahun 2020, Kecamatan Ngawen menjadi wilayah terdampak paling banyak meliputi 9 desa. Sedangkan Kecamatan Cepher menjadi wilayah terkecil terdampak yakni desa Kuncen, disusul Kecamatan Delanggu dengan desa terdampak dua wilayah yakni Sidomulyo dan Mendak. **(Sit)**

GERAK BUDAYA DPRD KABUPATEN MAGELANG
Jadi Prototipe Event di Masa Pandemi Covid-19



MUNGKID (KR) - DPRD Kabupaten Magelang menggelar event Sosialisasi Kebangsaan ‘Gerak Budaya’ secara virtual, Minggu (20/9). Even budaya itu diharapkan jadi prototipe kegiatan selama pandemi Covid-19. Event Gerak Budaya bekerja sama dengan beberapa komunitas, mulai dari Komunitas Pinggir Kali, Pemuda NU Muntilan dan Komunitas Lima Gunung. Acara digelar di tiga titik, wilayah Kecamatan Kaliangkrik, Muntilan, dan Mungkid. Puncak kegiatan digelar dengan penerapan protokol kesehatan ketat, tamu dibatasi. Kemudian tempat duduk dibuatkan skat dari bambu sehingga berjarak. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Magelang Suharno MM berharap event ini jadi prototipe kegiatan di masa pandemi Covid-19, sehingga kegiatan yang memberikan dampak positif bagi para seniman bisa terus berjalan. “Ruang-ruang ekspresi wajib kita ciptakan untuk tetap memberikan tempat bagi seniman dan masyarakat berkegiatan. Dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Mahmud, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Magelang.

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Magelang HM Soleh mengatakan dalam kegiatan itu, DPRD juga melakukan kegiatan sosialisasi program kerja, terutama selama setahun. Sosialisasi perda hingga program

kerja DPRD, pelaksanaannya digelar secara virtual. Ketua DPRD Kabupaten Magelang mengatakan acara disiarkan secara langsung oleh akun instagram @Magelang, @Magelang_Raya, @MagelangGayeng, @Jelajah.Magelang dan Facebook Borobudur News.

Tampil sebagai bintang tamu pada Minggu (20/9) malam, musisi sekaligus youtuber Magelang Woro Widowati. Ia menyanyikan lima lagu, dimana salah satunya duet bersama Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sariyan Adi Yanto dengan lagu Gede Roso. Saat keduanya tampil, respons pemirsa demikian menggema. Bahkan beberapa kali mereka meneriakkan yel-yel agar Woro Widowati dan Sariyan terus bernyanyi di atas panggung.

Dalam pesannya, Sariyan Adi Yanto menyampaikan bahwa Pandemi

Covid-19 mengejutkan kita semua, membuat kita gagap dan bingung. Karena itu, semua lapisan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan agar virus korona tidak merajalela. Meski tampil dalam jumlah yang cukup banyak, protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. “Tapi, kita harus bangkit dan mencoba bergegas kembali. Jika ingin bertahan kita harus mutlak beradaptasi, i katanya.

Sariyan mengungkapkan, melalui event Gerak Budaya kita ingin supaya kegiatan tetap berjalan. Disiarkan secara virtual oleh enam akun instagram dan facebook. Dimana masyarakat di manapun bisa menyaksikan tanpa harus datang ke lokasi. Hal itu sebagai penyiasatan suasana, meski dalam suasana pandemi Covid-19, para seniman tetap bisa menunjukkan karya-karyanya. Penampilan para seniman sekaligus sebagai bentuk interaksi dengan penggemarnya. “Kami ingin terus belajar

bagaimana beradaptasi. Supaya pandemi Covid-19 tidak menjadikan masyarakat gagap, melainkan justru bisa mengambil hikmahnya dan bangkit dari keterpurukan,” tegasnya. “Kita adalah umat yang tidak boleh berhenti belajar, dengan itulah karya dan kebudayaan kita akan terus berpijar, sehingga tidak boleh berhenti hanya karena pandemi Covid-19,” tandasnya. Rangkaeven dipadukan kegiatan podcast, seni budaya dan kesenian. Seperti kunthulan, topeng ireng, tari kipas, soreng, ritual, dan talkshow dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Magelang. Diharapkan event Gerak Budaya yang diprakarsai DPRD Kabupaten Magelang mampu membangkitkan gairah masyarakat untuk terus berkarya sekaligus membuktikan bahwa pandemi Covid-19 bukan berarti harus mematikan kreativitas dan kegiatan masyarakat lainnya. **(Adv)**



KR-Istimewa
Tampilan Sosialisasi Kebangsaan Gerak Budaya.